

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang masih melekat di Negara Indonesia karena hampir di seluruh provinsi masih ada daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (Dama, dkk. 2016). Bagi pemerintah Indonesia, permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang harus diselesaikan agar kehidupan masyarakatnya menjadi makmur dan sejahtera. Indonesia merupakan negara berkembang dengan pendapatan yang relatif rendah. Akibatnya, proses pembangunan ikut terkena dampaknya. Pembangunan menjadi terhambat sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi semakin melambat. Kemiskinan timbul ketika seseorang belum dapat memenuhi taraf hidup yang ditafsirkan sebagai kebutuhan dasar untuk memenuhi taraf hidup tertentu (Robby, 2020).

Ada dua paradigma utama atau teori besar mengenai kemiskinan yaitu paradigma Neo-Liberal dan demokrasi sosial (*social democracy*). Teori Neo-Liberal tentang kemiskinan menganggap bahwa kemiskinan adalah masalah individu yang disebabkan oleh kelemahan atau keputusan hidup yang diambil oleh orang tersebut. Penyebab terjadinya kemiskinan Menurut teori Neo-Liberal, kelemahan individu, pengaturan pendapatan yang tidak efektif, dan kekurangan dalam karakter pribadi menjadi faktor penyebab seperti tidak memiliki semangat dan tidak memiliki pengetahuan. Menurut teori sosial demokrat, kemiskinan adalah masalah struktural yang berkaitan dengan ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dan bukanlah masalah

individu. Menurut teori ini, kemiskinan adalah hasil dari ketidakadilan sosial dan ketimpangan dalam struktur ekonomi dan politik (Tony Imam, 2010).

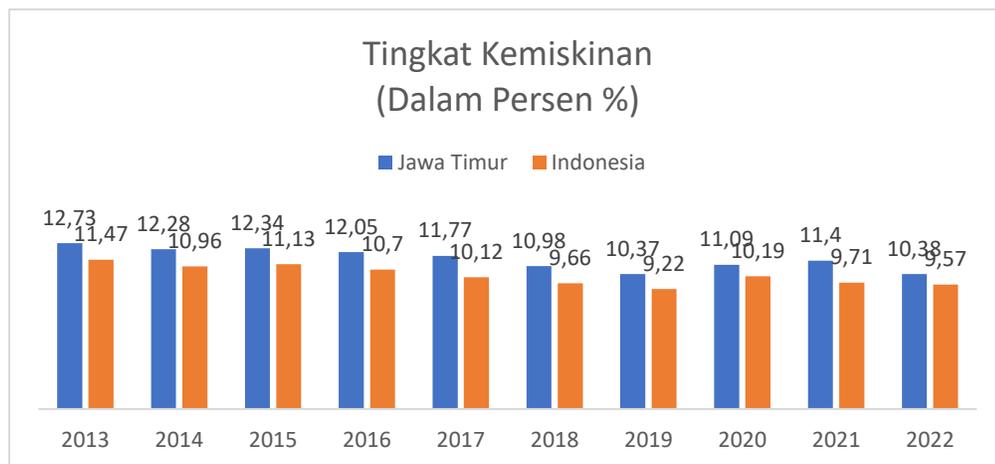
Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan, seperti ketidakmerataan distribusi aset produksi dan kebijakan ekonomi yang tidak adil. Kemiskinan struktural pada dasarnya bersumber dari berbagai program dan kebijakan yang tidak terarah dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan yang tidak terarah tersebut menyebabkan aset kepemilikan atas sumber daya timpang, Ketidaksamaan kesempatan menyebabkan partisipasi masyarakat tidak merata, yang mengakibatkan ketimpangan struktur masyarakat (Mohammad Maulana Iqbal, 2023). Kemiskinan dapat terjadi akibat kebijakan tertentu yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebut “*accidental poverty*” (Ardian et al., 2021).

Menurut Kuncoro (2010:8) dalam (Sari, 2021), Kemiskinan timbul akibat ketidakseimbangan dalam kepemilikan sumber daya, yang mengarah pada ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Perbedaan kualitas sumber daya manusia juga menyebabkan kemiskinan ; kualitas sumber daya manusia yang rendah menyebabkan rendahnya produktivitas, yang pada pasangannya menyebabkan rendahnya pendapatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penduduk miskin rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan menurut Pateda (2019) terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan yaitu pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah dan keterbatasan modal. Faktor-faktor tersebut juga disebutkan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Winarti, 2014), yang menyatakan bahwa kemiskinan dapat memberikan dampak yang berarti terhadap kemajuan manusia karena kemiskinan merupakan permasalahan yang bermula dari ketidakberdayaan masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesejahteraan terabaikan, akibatnya timbul sumber daya manusia yang berkualitas rendah atau produktivitas rendah berdasarkan sudut pandang ekonomi.

Grafik kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan pola yang serupa dengan angka kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan. Namun, tingkat kemiskinan di Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, hal tersebut menjadi masalah mengingat kontribusi besar Provinsi Jawa Timur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data BPS Indonesia, pada tahun 2022, Dari 34 provinsi di Indonesia, angka kemiskinan di Jawa Timur berada di urutan ke-19. Perkembangan kemiskinan di Indonesia dan Jawa Timur dijelaskan pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1. 1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2022



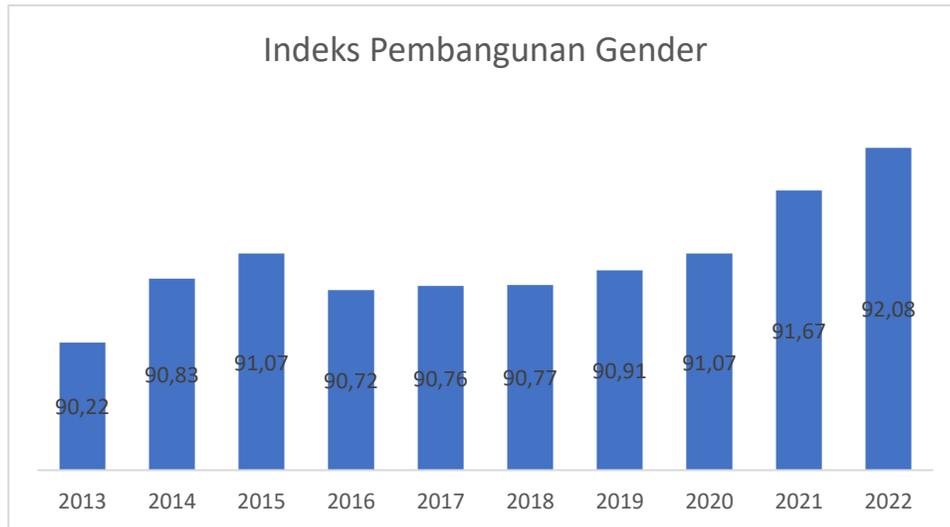
Sumber: BPS Indonesia, 2023

Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur selama 10 tahun dari tahun 2013-2022 mengalami ketidakstabilan, di mana jika

dianalisis secara runtut justru mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di Jawa Timur sebesar 10,98% kemudian terjadi penurunan angka kemiskinan yaitu 10,37%. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang tidak cukup tinggi yaitu sebesar 11,09% dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Tahun 2021 angka kemiskinan kembali naik sebesar 11,40% dan di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 10,38% karena adanya program penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Dari grafik ini *trend* kemiskinan dapat diketahui bahwa terjadi presentase yang cenderung naik selama 10 tahun terakhir (Edris, 2020).

Kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan sosial disebut kemiskinan struktural. Seperti halnya yang terjadi di Jawa Timur, di mana kemiskinan struktural terjadi karena ketimpangan adalah hasil dari tindakan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi, serta tatanan ekonomi global yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Selain itu, terdapat faktor lain yang berpengaruh pada kemiskinan struktural di Jawa Timur yaitu Ketimpangan Gender. Konsep "gender" mengacu pada rangkaian peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologi, tetapi oleh faktor sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Sebagian besar wilayah Indonesia masih mengalami perbedaan pembangunan gender, dengan perbedaan yang jelas antara wilayah timur dan barat. Dari segi sumber daya manusia, potensi daerah, dan atribut lainnya. Perbedaan ini menunjukkan ketidaksamaan dalam pembangunan manusia berdasarkan gender. Situasi ini bertentangan dengan tujuan pembangunan Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin bahwa hasil pembangunan yang sama untuk semua orang (Azuri, Zulhanif, dan Pontoh, 2016).

Gambar 1. 2 Indeks Pembangunan Gender di Jawa Timur



Sumber: BPS Jawa Timur, 2023

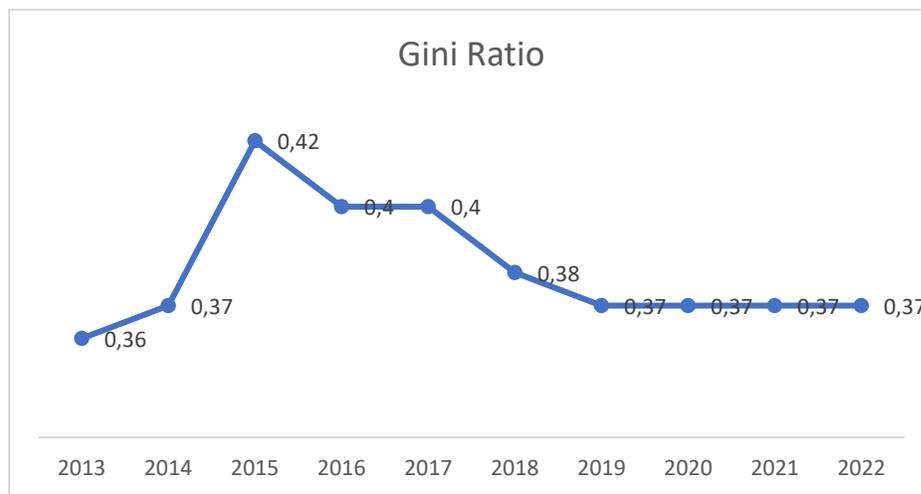
IPG (Indeks Pembangunan Gender) Dari tahun 2013 hingga 2020, kategori kesetaraan gender Provinsi Jawa Timur tetap berada di bawah rata-rata, menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang relatif rendah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur naik dari 90,22 pada tahun 2013 menjadi 91,67 pada tahun 2020, dan mencapai 92,08 pada tahun 2022, lebih tinggi dari rata-rata nasional 91,63. Peningkatan IPG ini disebabkan oleh perbaikan dalam beberapa indikator, seperti kesehatan dan standar hidup. IPG memiliki nilai 0-100 persen, dan nilai yang semakin tinggi, disparitas pembangunan yang semakin besar antara laki-laki dan perempuan. (BPS, 2022).

Salah satu penyebab kemiskinan struktural lainnya merupakan kesenjangan yang terjadi dalam penyebaran pendapatan. Faktor utama yang membuktikan bahwa di dalam masyarakat terjadi kesejahteraan adalah dengan rendahnya ketimpangan pendapatan, yang diukur melalui pendapatan nasional dan pendapatan per kapita (Arif & Agustin Wicaksani, n.d.). untuk menintervensi buruk atau baiknya pendistribusian

pendapatan dalam ketimpanganyang diterima oleh masyarakat, dapat digunakan Koefisien Gini (Gini Ratio) secara luas untuk mengukur *tren* ketimpangan (Hindun et al., 2019). Agregat Koefisien gini adalah ukuran statistik utama yang digunakan untuk mengevaluasi ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan (Anonim, 2020).

Dapat dilihat pada Gambar 1.3 pada tahun 2017 nilai Gini Ratio di Jawa Timur sebesar 0,4 kemudian mengalami penurunan menjadi 0,38 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran di Jawa Timur meningkat selama periode tersebut. Selama periode 2019-2022, Provinsi Jawa Timur menunjukkan rasio Gini yang konsisten. Meskipun terjadi penurunan, hal ini belum cukup untuk membuktikan bahwa kesenjangan pendapatan antar daerah telah merata.

Gambar 1. 3 Gini Ratio di Jawa Timur



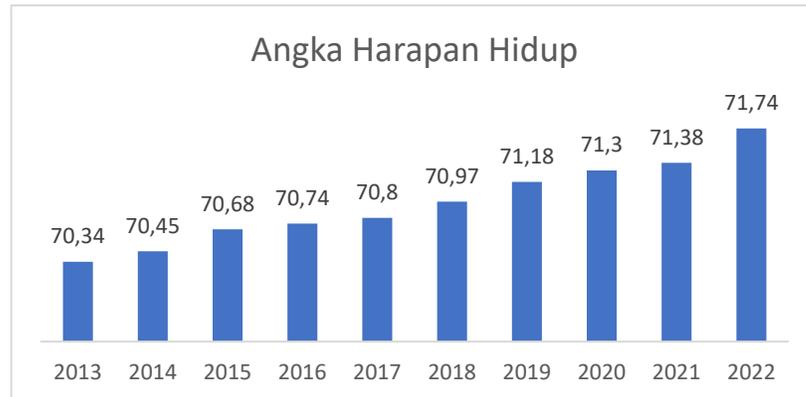
Sumber: BPS Jawa Timur, 2023

Pekerja di lapisan bawah cenderung menerima upah yang lebih rendah karena jumlah tenaga kerja melebihi permintaan. Fenomena ini dipicu oleh pertumbuhan populasi yang mengejar peluang kerja yang terbatas, sehingga meningkatkan

ketimpangan. Di Jawa Timur, ketidakseimbangan dalam jumlah penduduk miskin disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata. Ketimpangan pendapatan dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial, kecemasan, serta masalah kemanusiaan seperti kelaparan, kondisi kesehatan yang buruk, dan kekurangan gizi. Jika kondisi ini terus berlanjut, dapat merusak stabilitas pemerintahan dan perekonomian makro. Akhirnya, pemerintahan mungkin akan mengalami keruntuhan. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki pemerataan pendapatan.

Tiap lapisan masyarakat memerlukan kesehatan, tanpa memandang tingkat pendapatan. Suryawati (2005) menjelaskan bahwa kelompok masyarakat miskin lebih rentan terhadap masalah kesehatan karena keterbatasan sumber daya ekonomi yang membuat mereka kesulitan dalam merawat diri dan memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2009) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesehatan. Oleh karena itu, Angka Harapan Hidup digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum, khususnya derajat kesehatan.. Menurut (Angraini & Lisyaningsih, n.d.), Rendahnya Angka Harapan Hidup di suatu daerah menunjukkan bahwa sektor kesehatan belum mencapai keberhasilan yang diharapkan, sementara tingginya Angka Harapan Hidup menandakan pencapaian yang lebih baik dalam pembangunan kesehatan.

Gambar 1. 4 Angka Harapan Hidup di Jawa Timur



Sumber: BPS Jawa Timur, 2023

Angka Harapan Hidup di Jawa Timur sebesar 70,97 pada tahun 2018 dan telah meningkat menjadi 71,74 pada tahun 2022 selama empat tahun terakhir, menurut data Badan Pusat Statistik . Namun terlepas dari pelaksanaannya program kesehatan dan program sosial ekonomi yang dapat dicapai dengan baik, umumnya ditunjukkan dari adanya peningkatan angka harapan hidup penduduk dalam suatu daerah (BPS Provinsi Jawa Timur, 2019).

Kesehatan tidak hanya menjadi indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan individu dan masyarakat di suatu daerah, tetapi juga berfungsi sebagai aset krusial dalam upaya peningkatan taraf hidup. Dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat, maka banyak hal positif yang dapat dicapai. Hal ini menjadi dasar bagi negara-negara di seluruh dunia untuk terus berupaya meningkatkan tingkat kesehatannya. Oleh karena itu, kesehatan juga merupakan faktor penting dalam pencapaian pembangunan terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti sebelumnya juga banyak melakukan penelitian tentang kemiskinan, termasuk penelitian tentang pengaruh ketimpangan gender pada kemiskinan yang

dilakukan Jacobus, Engka, dan Kawung, (2022) bahwa ketidaksetaraan gender berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Menurut peneliti (Via Aprilia, Mike Triani, 2022) mengatakan variabel ketimpangan gender berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa, Wulandari, dan Rahayu (2020) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, Cendanawangi, Hariadi, dan Ariani (2020) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, Atmodjo (2017) melaporkan bahwa ketimpangan pendapatan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan."

Menurut penelitian mengenai pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan yang dilaksanakan (Islami & Anis, n.d.) menyatakan bahwa kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Suprianto, 2017) membuktikan bahwa kesehatan tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian terdahulu, ditemukan adanya berbagai macam faktor penentu permasalahan. Hasil yang diungkapkan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian ini tidak sama dan tidak konsisten. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyadari perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan serangkaian uji tentang keterbaruan determinan kemiskinan. Dalam pengkajian ini, kemiskinan yang berada di Jawa Timur merupakan perkara yang hendak diteliti bahwa kemiskinan di Jawa Timur relatif tinggi. Hal ini melihatkan diperlukannya analisa bermacam sebab yang mempengaruhi,

yakni ketimpangan gender, ketimpangan pendapatan dan kesehatan. “**Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Struktural di Provinsi Jawa Timur**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah indeks pembangunan gender berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur?
2. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur?
3. Apakah ketimpangan kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan gender terhadap kemiskinan di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh ketimpangan kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data panel pada kurun waktu 10 tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 dan di Provinsi Jawa Timur.

Variabel terikat atau variabel dependen pada penelitian ini menggunakan kemiskinan struktural dan variabel independen yang terdiri dari ketimpangan gender, ketimpangan pendapatan dan kesehatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat digunakan sebagai ulasan untuk mempertimbangkan kebijakan dengan mengerahkan upaya meminimalkan kemiskinan di Jawa Timur.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan tambahan yang ada di perpustakaan, sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian tentang tema yang sama.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengentasan kemiskinan.